

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyajian aset pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Timur dengan PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan atas hasil pemeriksaan BPK yaitu masih banyak Pemerintah Daerah yang belum menerapkan sepenuhnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Pemerintah daerah juga yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang digunakan bertujuan untuk mengetahui gambaran data hasil penelitian. Pelaporan LKPD dianalisis kesesuaian penyusunan laporannya berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. (Kas Menuju Akrual).

Pengakuan aset tetap menunjukkan bahwa masih cukup banyaknya aset pemerintahan Kabupaten Lombok Timur yang belum lengkap. Ditemukan aset tanah yang belum memiliki sertifikat dan terdapat sertifikat ganda. Aset kendaraan dinas yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya disebabkan tidak tertibnya Pengurus Barang dalam melakukan pencatatan aset ketika terjadi mutasi aset antar SKPD dan sampai dengan saat ini masih dalam tahap penelusuran aset. Pada aset tetap gedung dan bangunan masih terdapat yang belum dilengkapi dengan lokasi dan peruntukannya. Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan bahwa terdapat aset yang belum teridentifikasi lokasinya. Aset tetap lainnya terdapat aset yang belum teridentifikasi jenis dan lokasinya. Hasil pelaporan aset tetap pada laporan keuangan Kabupaten Lombok Timur diperoleh tidak adanya rincian biaya penyusutan setiap aset tetap. Hal ini menunjukkan tidak adanya pencatatan biaya penyusutan.

Kata kunci : Aset Daerah, PP No. 71 Tahun 2010

## **ABSTRACT**

*This research aims to determine the congruity of the presentation of the assets on the financial report of the regional government (LKPD) Regency of East Lombok with PP No. 71 Year 2010. This is due to the examination results of BPK is still many local governments that have not yet been fully apply the Government Regulation Number 71 Year 2010 about SAP based on accrual. Local governments are yet to get reasonable opinion without exception (WTP) from BPK.*

*Method of analysis in this research is a descriptive analysis method. The descriptive analysis used aims to know the representation of the research result data. Reporting LKPD analyzed the suitability of the preparation of the report based on PP No. 71 2010. (Cash Toward Accrual).*

*Fixed assets recognition shows that are still quite many government assets Regency of East Lombok is not complete. Found that does not yet have land assets certificate and there is a double certificate. The office vehicle assets could not be traced his existence because no goods Management discipline in doing the recording of assets when there is a mutation of assets between the SKPD and up to the moment is still in the stage of asset lookup. On the fixed assets of the building and the building is still there that has not been equipped with location. Fixed Assets the road, irrigation and that there is a network asset that has yet to be identified the location. There is other fixed asset that has yet to be identified the type and location. Fixed assets reporting results on the financial report of Regency of East Lombok obtained lack the details of Depreciation Cost of each fixed assets. This shows the lack of recording depreciation cost.*

*Key Words : government assets, PP No. 71 Year 2010*